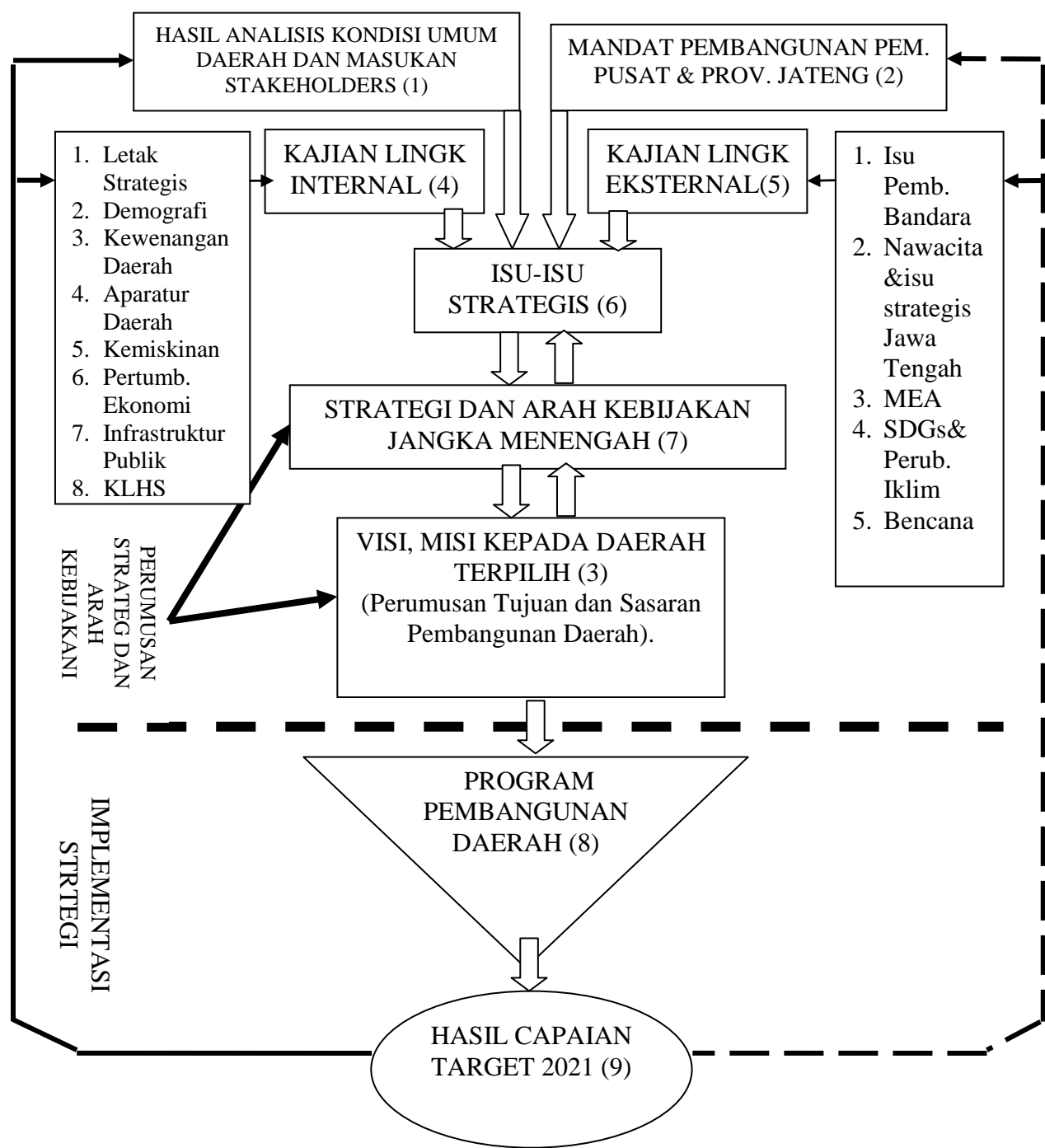


BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan.

Untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah, secara skematis dapat dijelaskan alur perumusan strategi pembangunan daerah sebagaimana dalam gambar 6.1 dibawah ini.



Gambar 6.1 : Alur Perumusan Strategi Pembangunan Daerah

6.1. Hasil Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan strategi dan kebijakan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan sebagai hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Hasil rekomendasi KLHS dirumuskan melalui tahapan pelaksanaan KLHS meliputi:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu daerah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya hasil yang diperoleh dari KLHS berupa rekomendasi untuk perbaikan pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program.

6.1.1 Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Isu-Isu strategis pembangunan berkelanjutan dirumuskan dari daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan yang telah diidentifikasi oleh Pokja Pengendalian Lingkungan menggunakan teknik skoring menggunakan kriteria :

1. Aktual: riil dan saat ini terjadi serta menjadi perhatian
2. Kompleks: melibatkan sejumlah aspek yang saling terkait (aktor, sektor, wilayah)
3. Urgent: darurat dan harus segera diatasi serta berpotensi berdampak jangka panjang
4. Relevan: mempunyai keterkaitan/berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan
5. Sensitif: berpotensi (secara berantai) mengurangi upaya pencapaian tujuan pembangunan secara signifikan dan/atau beresiko biaya tinggi

Dari hasil skoring yang dilakukan diperoleh isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Sumberdaya air, tanah dan udara mengalami ancaman penurunan kualitas;
2. Kondisi lingkungan hidup khususnya kelestarian keanekaragaman hayati mengalami ancaman penurunan kualitas;
3. Pengelolaan persampahan dan limbah perkotaan belum terselenggara dengan optimal;
4. Budidaya pertanian belum berkembang dengan optimal;
5. Penyelenggaraan penataan ruang menghadapi kendala dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang.

6.1.2 Program Prioritas yang Berpengaruh Terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

RPJMD yang seluruhnya memuat 130 (seratus tiga puluh) program, setelah diidentifikasi oleh Pokja Pengendalian Lingkungan terdapat 14 (empatbelas) program prioritas atau 10,8 % yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan yang bersifat strategis yaitu:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih;
2. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung;
4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
5. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan;
6. Program Peningkatan Produksi Perikanan;
7. Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan;
9. Program Peningkatan Produksi Peternakan;
10. Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
12. Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah;

- 13. Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian Dan Peternakan;
- 14. Program Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan

6.1.3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program RPJMD

Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan berpendapat bahwa rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan (yang dirangkum dalam suatu Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021) sudah cukup baik, karena masing-masing item sudah merefleksikan:

- 1. prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan),
- 2. prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta
- 3. prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender).

Tabel 6.1.
Catatan Perbaikan Visi – Misi RPJMD 2016-2021

No	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Catatan Perbaikan
1	Antar Waktu	Kalimat visi dinilai sudah tepat dengan penggunaan kata “Semakin Sejahtera“ dalam Visi RPJMD 2016-2021 dinilai cukup tepat untuk menunjukkan adanya keterkaitan antar waktu sebagai proses mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo serta menunjukkan adanya keterkaitan dalam RPJMD periode sebelumnya.
	Antar Sektor	
	Antar Pemangku Kepentingan	
		Demikian pula dengan basis ekonomi yang dipilih sebagai tumpuan ekonomi wilayah menunjukkan keterkaitan antarsektor pertanian,

No	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Catatan Perbaikan
		<p>industri, pariwisata dan perdagangan.</p> <p>Sedangkan dari aspek antar pemangku kepentingan telah ditunjukkan dengan kata berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan.</p>
2	Ekonomi	<p>Aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup telah terungkap secara eksplisit dalam kalimat visi sebagai bentuk wawasan pembangunan yang akan dilakukan yaitu berwawasan budaya (aspek sosial ada di dalamnya), lingkungan dan ekonomi kerakyatan yang merupakan prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan.</p> <p><i>Catatan :</i> Kalimat visi belum terurai secara sinergis ke dalam Misi karena belum ditemukan kata yang mengungkapkan adanya keterkaitan aspek lingkungan, seperti yang tercantum di dalam Visi yang menyebutkan “berwawasan lingkungan” sehingga di dalam misi perlu ditambahkan mengenai kata/istilah lain tentang berwawasan lingkungan</p>
	Sosial	
	Lingkungan Hidup	
3	Antar Kelompok Masyarakat	<p>Penyebutan sektor-sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan menunjukkan keterkaitan antar kelompok masyarakat yang beraktifitas dalam empat sektor tersebut untuk bersinergi dalam pembangunan wilayah selanjutnya terurai dalam kata demokratis dalam misi</p>
	Antar Generasi	

No	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Catatan Perbaikan
		<p>pertama.</p> <p>Sedangkan aspek antar generasi dapat disarikan dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam kalimat visi berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan yang memberikan kesan pemanfaatan sumberdaya secara bijak untuk generasi yang akan datang.</p>

Sumber : dokumen pelaksanaan KLHS RPJMD 2016-2021

Kelompok kerja Pengendalian Lingkungan Hidup telah melakukan kajian terhadap program-program prioritas yang dinilai memberikan pengaruh negatif terhadap kelima isu pembangunan berkelanjutan. Proses diawali dengan identifikasi pengaruh kumulatif program-program tersebut terhadap isu pembangunan berkelanjutan, menguraikan *base line* data, pengaruh yang disebabkan, penyebabnya hingga sebaran keruangan dan lamanya pengaruh yang diberikan. Dari pengaruh yang diberikan oleh program-program prioritas tersebut dirumuskan mitigasi/adaptasi hingga alternatif yang akan dimasukkan dalam rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana dan/atau program. Tabel 8.2. di bawah merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Pokja Pengendalian Lingkungan terhadap kebijakan, rencana dan program prioritas.

Tabel 6.2.
Hasil Rekomendasi Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	REKOMENDASI
1	2	3
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain: pengambilan air bawah tanah harus dilakukan dengan bijaksana dan dilakukan pengendalian oleh pemangku kepentingan terkait. Aktivitas pemantauan terhadap tinggi muka air tanah untuk mengetahui apakah terjadi penurunan <i>aquiver</i> air tanah perlu dilakukan secara periodik. Disamping itu untuk aktivitas pengeboran sumur dalam harus memperhatikan batas debit maksimal pengambilannya sebagai bentuk ketentuan perizinan. Sedangkan untuk kepentingan industri dan rumah tangga agar pengambilan air baku tidak dilakukan pada saluran irigasi agar tidak mengganggu aktivitas pertanian. Perangkat Daerah yang melaksanakan program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA
2	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan agar dilaksanakan dengan : upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada TPS/kontainer/Transfer Depo yang tersedia. Disamping itu perubahan pola perilaku masyarakat perlu didukung dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui pengembangan TPST 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) untuk pelayanan skala lingkungan permukiman. Dari aspek pengangkutan sampah dari TPS/kontainer/Transfer Depo menuju TPA agar menggunakan armada pengangkutan sampah yang tertutup. Sedangkan pada lokasi TPA Gunung Tumpeng Di Desa Jetis, Loano perlu dilakukan perbaikan sistem pengelolaan sesuai standar pengelolaan <i>control landfill</i> pada TPA.
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung agar dilakukan dengan meningkatkan pengawasan pengambilan bahan galian untuk material bangunan hanya pada kawasan yang ditentukan untuk peruntukan pertambangan. Pembangunan bangunan gedung agar tidak memanfaatkan lahan pertanian produktif serta membatasi pada kawasan sesuai peruntukan permukiman dalam RTRW Kabupaten Purworejo. Disamping itu agar setiap pembangunan bangunan gedung agar menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah pada skala permukiman. Perangkat Daerah yang melaksanakan program Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan agar dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan pengambilan bahan galian untuk material bangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	REKOMENDASI
		<p>hanya pada kawasan yang ditentukan untuk pertambangan. Pengukuran emisi karbon kendaraan perlu dilakukan secara periodik pada jalan-jalan dengan kepadatan tinggi dan pada kawasan industri <i>AMP</i> untuk mengetahui kualitas udara ambien sesuai baku mutu yang ditetapkan. Penanaman vegetasi pada RTH jalan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon serta pembatasan terjadinya alih fungsi pada proses perizinan dari lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun pada sepanjang jalan.</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.</p>
5	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	<p>Program Peningkatan Pelayanan Perijinan agar dilaksanakan dengan memperkuat ketentuan perizinan yang bertujuan untuk menjaga kualitas sumberdaya air, tanah udara dengan pemantauan atau audit lingkungan serta pengawasan/pengetatan perijinan alih fungsi lahan pertanian.</p>
6	Program Peningkatan Produksi Perikanan	<p>Program peningkatan produksi perikanan agar dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan untuk menggunakan pakan dan obat – obatan secara terukur dan tidak berlebihan guna mengurangi penurunan kualitas air dan tanah, selain itu untuk peningkatan produksi perikanan dengan Mengimplementasikan <i>good agriculture practice</i> dalam zonasi budidaya tambak udang dan Membatasi area tambak udang, supaya tidak merusak lingkungan dan merusak keanekaragaman hayati / mangrove</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan Program peningkatan produksi perikanan agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.</p>
7	Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar dilaksanakan dengan mengembangkan pariwisata dengan memperhatikan manajemen lingkungan dengan menyediakan fasilitas sanitasi dan tempat pembuangan sampah serta menerapkan unit pengelolaan sampah dan limbah di lokasi wisata</p>
8	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan	<p>Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan agar dilaksanakan dengan implementasi pertanian organik dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida anorganik.</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.</p>
9	Program Peningkatan Produksi Peternakan	<p>Program Peningkatan Produksi Peternakan agar dilaksanakan dengan melarang aktivitas peternakan skala besar di kawasan permukiman</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Peningkatan Produksi Peternakan agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.</p>
10	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	<p>Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan agar dilaksanakan dengan implementasi pertanian organik dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida anorganik.</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan Program</p>

NO	PROGRAM PRIORITAS	REKOMENDASI
		Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan agar dilaksanakan dengan pola meningkatkan pengawasan pengambilan bahan galian untuk material bangunan hanya pada kawasan yang ditentukan untuk pertambangan dan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di sarana perdagangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.
12	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah agar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip industri ramah lingkungan dengan menerapkan prosedur produksi berproses sesuai standar serta mendirikan industri agar dilengkapi IPAL Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.
13	Program Agribisnis komoditas unggulan pertanian dan peternakan	Program Agribisnis komoditas unggulan pertanian dan peternakan agar dilaksanakan dengan implementasi pertanian organik dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida anorganik dan melarang aktivitas peternakan skala besar di kawasan permukiman. Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Agribisnis komoditas unggulan pertanian dan peternakan agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.
14	Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan	Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan agar dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan untuk menggunakan pakan dan obat – obatan secara terukur dan tidak berlebihan guna mengurangi penurunan kualitas air dan tanah, selain itu untuk peningkatan produksi perikanan dengan Mengimplementasikan <i>good agriculture practice</i> dalam aktifitas budidaya tambak udang dan Membatasi area tambak udang, supaya tidak merusak lingkungan dan merusak keanekaragaman hayati / mangrove. Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan agar menindaklanjuti dengan menyusun KLHS RENSTRA.

Sumber : Dokumen pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo 2016-2021

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, perlu disesuaikan dengan tujuan pengembangan wilayah Jawa-Bali yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019.

Tujuan pengembangan Wilayah Jawa-Bali tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Jawa-Bali dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi, pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo pada 5 (lima) tahun mendatang yang telah diintegrasikan dengan rekomendasi hasil KLHS adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.3 berikut ini :

Tabel 6.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2016-2021

VISI : Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan Yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
I	Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.			
I.1	Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini	Meningkatnya semangat kehidupan beragama	Mewujudkan kerukunan hidup beragama dan penanaman nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini melalui fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama	Meningkatkan semangat kehidupan beragama melalui pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama
I.2	Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	Optimalisasi partisipasi publik melalui pelayanan komunikasi publik	Meningkatkan partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan melalui pemanfaatan wahana komunikasi public
II	Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.			
II.1	Meningkatkan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui - peningkatan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu secara terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan- desa)	1. Peningkatan pelayanan dasar melalui Sistem Jaminan Sosial bidang Kesehatan, Pendidikan, Pangan dan Papan 2. Dukungan bagi peningkatan produktivitas penduduk miskin

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui : 1. pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitasnya serta peningkatan kesempatan kerja ; 2. pengembangan dan perlindungan tenaga kerja	1. Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja, dengan pelatihan berbasis kompetensi, layanan permagangan, padat karya serta meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan milik masyarakat, menyelenggarakan forum-forum untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, dan meningkatkan ketersediaan informasi pasar kerja 2. pengembangan dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja (jaminan sosial, syarat kerja, peraturan ketenagakerjaan) di perusahaan
II.2	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan	Optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dengan meningkatkan produktivitasnya, menerapkan teknologi, dan memberdayakan penyuluh. Disertai

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup meliputi :implementasi pertanian organik,larangan aktivitas peternakan skala besar di kawasan permukiman, pembinaan kepada pelaku usaha perikanan tentang penggunaan pakan dan obat-obatan, GAP dlm zonasi budidaya tambak udang, pembatasan area tambak udang,
		Meningkatnya ketersediaan,distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan dengan mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarana prasarana pendukungnya dan memperbaiki pola konsumsi pangan
II.3	Mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Mengembangkan agribisnis melalui pelaksanaan usaha agribisnis komoditas pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan	Melaksanakan usaha agribisnis dengan peningkatan sub sistem agroinput dan agroonfarm komoditas unggulan (Padi, Jagung, Durian, Biofarmaka, Kambing PE, Ikan, dan Gula Kelapa). Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup yaitu dengan penerapan pertanian organik disertai pembinaan kepada pelaku usaha perikanan tentang penggunaan pakan

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				dan obat-obatan, GAP dlm zonasi budidaya tambak udang, pembatasan area tambak udang
				Melaksanakan usaha agribisnis dengan peningkatan sub sistem agroprosesing dan agromarketing komoditas unggulan (Padi, Jagung, Durian, Biofarmaka, Kambing PE, Ikan dan gula kelapa)
II.4	Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Meningkatkan daya jual potensi wisata daerah melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, <i>community development</i> , serta investor asing. Disertai upaya mitigasi meliputi : manajemen lingkungan dengan menyediakan fasilitas sanitasi dan tempat pembuangan sampah di lokasi wisata
II.5	Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah	Berkembangnya industri kecil dan menengah	Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah	Melaksanakan pengelolaan industri kecil dan menengah melalui pendataan, peningkatan kapasitas usaha dan pelatihan
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) melalui upaya penumbuhan, penyehatan, dan pengawasan Koperasi serta UMK	Melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan pengembangan jejaring usaha, peningkatan kualitas kelembagaannya, dan lomba-lomba dalam rangka penumbuhan usaha kecil berbasis desa

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
II.6	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya nilai investasi	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perijinan , mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Atap, pelayanan perizinan online, Promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup meliputi: Pemantauan/audit lingkungan serta pengawasan/pengetatan perijinan alih fungsi lahan pertanian
II.7	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana, promosi , keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen	Melakukan revitalisasi pasar daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan daerah, melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya. Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup meliputi : pengawasan pengambilan bahan galian dan adanya TPST

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
II.8	Mewujudkan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	Mewujudkan interkoneksi antarpusat kegiatan dan produksi melalui peningkatan kualitas pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan. Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup meliputi: pengawasan pengambilan bahan galian, kesesuaian dengan arahan peruntukan RTRW, pengukuran emisi, dan penanaman vegetasi
		Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan melalui peningkatan kualitas pengelolaan layanan transportasi darat	Peningkatan kualitas pengelolaan layanan melalui upaya keselamatan transportasi
II.9	Meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat	Pemenuhan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas sesuai target nasional	Peningkatan cakupan akses layanan air minum, sanitasi dan rumah layak huni sesuai target nasional Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup meliputi pengolahan sampah secara terpadu serta terkait air bersih perlu upaya pemantauan atas pengambilan air bawah tanah.
II.10	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan	Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan melalui penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup yaitu pengawasan pengambilan bahan galian

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
II.11	Meningkatkan pengembangan kawasan strategis	Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city.	Pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan infrastruktur kawasan strategis	Pembangunan infrastruktur kawasan strategis dengan membangun sarana prasarana dasar dan penunjang kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo, purwokulon (border city), kawasan strategis cepat tumbuh
II.12	Meningkatkan ketahanan air guna mendukung kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pelayanan irigasi	Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pengembangan sistem irigasi dan drainase.	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi dan drainase melalui pelayanan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi dan drainase.
II.13	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan optimalisasi upaya pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan persampahan dan limbah	Optimalisasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemenuhan baku mutu kualitas air, udara, serta meningkatkan tingkat tutupan lahan vegetasi
				Optimalisasi pengelolaan persampahan dan limbah melalui pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu dan berbasis komunitas
III	Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal			
III.1	Meningkatkan Aktualisasi dan Pelestarian Budaya serta dan kearifan lokal untuk menunjang pariwisata daerah	Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	Meningkatkan partisipasi pelaku budaya daerah dengan mengintensifkan pengembangan , pembinaan dan pelestarian seni , budaya, nilai sejarah dan kepurbakalaan	Mengintensifkan pengembangan dan pelestarian seni , budaya, nilai sejarah dan kepurbakalaan daerah melalui peningkatan inventarisasi dan pembinaan potensi, serta meningkatkan frekuensi event aktualisasi potensi tersebut
		Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya		

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
IV	Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya olahraga			
IV.1	Meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah	Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah melalui peningkatan kualitas pembinaannya	Peningkatan pembinaan prestasi seni dan budaya dengan meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budaya serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetisi seni dan budaya daerah
IV.2	Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya	Peningkatan kualitas pembinaan prestasi kepemudaan dan olahraga dengan meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan dan olahraga serta meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetisi kepemudaan dan olahraga
IV.3	Meningkatkan wahana pencapaian prestasi seni budaya dan olahraga	Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya	Meningkatkan ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya melalui sentralisasi wahana	Sentralisasi wahana peningkatan prestasi seni budaya dengan membangun dan mengembangkan art center
		Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatkan ketersediaan wahana peningkatan prestasi pemuda olahraga melalui sentralisasi wahana	Sentralisasi wahana peningkatan prestasi pemuda olahraga dengan membangun dan mengembangkan sport center dan youth center "heroes park"

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
V	Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.			
V.1	Meningkatkan pemerataan dan akses pada pendidikan berkualitas	Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas pada tingkat anak usia dini , pendidikan dasar, dan masyarakat serta peningkatan kualitas manajemen pelayanannya	Peningkatan akses-ibilitas pendidikan yg berkualitas pada ting- kat anak usia dini, pen- didikan dasar, dan masyarakat dengan memperbaiki distribu- si tenaga pendidik, me- ningkatkan ketersedia- an sarana prasarana pendidikan, mendorong peningkatan kualitas & hasil proses belajar mengajar, mening- katkan partisipasi stakeholder pendidikan
				Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan dengan meningkatkan kualitas data dan informasi tentang kondisi pendidikan, perencanaan di tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten, meningkatkan kualitas evaluasi dan pengendalian terhadap sekolah, proses belajar mengajar, dan tenaga pengajar
V.2	Mewujudkan pendidikan berbasis e-learning	Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-learning	Mewujudkan Satuan pendidikan berbasis e- learning melalui penyelenggaraan e- learning di tingkat SD dan SMP	Mewujudkan penyelenggaraan e- learning di tingkat SD dan SMP dengan melalui tahapan penyusunan roadmap program e-learning, penerapan secara komprehensif (sarana prasana hingga SDM pelaku) namun distribusi lokasi bertahap sesuai kondisi

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
V.3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas selama 24 jam	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui penyuluhan dan promosi kesehatan	Penyuluhan dan promosi kesehatan melalui satuan pendidikan dasar, Puskesmas, desa siaga, kader kesehatan dan masyarakat
			Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selama 24 jam melalui pelayanan berdasar siklus daur kehidupan	Pelayanan kesehatan berdasar siklus daur kehidupan dengan pelayanan skrining dan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, penanganan penyakit menular dan peningkatan kesehatan lingkungan
VI	Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.			
	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan aset	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah melalui ketepatan penyusunan APBD, pemantauan penyusunan APBDes, penertiban pengelolaan keuangan, pendapatan dan pengelolaan asset
		Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan daerah	Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen dengan meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis, peningkatan kualitas proses komunikasi publik perencanaan, peningkatan ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan maupun hasil.

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan melalui peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	Meningkatkan kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan melalui pengawasan internal secara berkala, pengendalian manajemen kebijakan, penanganan pengaduan, dan meningkatkan persentase pengembalian kerugian negara.
		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui optimalisasi jejaring sistem inovasi daerah	Optimalisasi jejaring sistem inovasi daerah dengan menyediakan wahana publikasi serta penghargaan atas hasil-hasil inovasi masyarakat dan daerah, meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi antar jejaring sistem inovasi daerah.
		Meningkatnya kompetensi aparatur	Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah	Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pelayanan administrasi kepegawaian
		Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif melalui bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan	Penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan perumusan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan dan koordinasi perangkat daerah

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	Optimalisasi fungsi camat dengan meningkatkan kualitas koordinasi tingkat kecamatan, pembinaan desa/kelurahan dan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tramtibus dan pemberdayaan masyarakat pada semua wilayah kerjanya, meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya.
		Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD	Memberikan dukungan pada DPRD melalui optimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi	Optimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan dewan.
		Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.	Peningkatan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di urusan komunikasi dan informasi melalui peningkatan keterbukaan informasi publik	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi dengan pengembangan e-government dan cyber city
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam keamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian.	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah melalui pelayanan dan penyediaan jasa persandian
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan dengan mengembangkan pola stelsel aktif maupun stelsel pasif

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam layanan penanganan masalah pertanahan melalui koordinasi penyelenggaraan pertanahan	Meningkatkan layanan penanganan masalah pertanahan melalui identifikasi tanah negara, dan pelayanan pengadaan tanah untuk kepentingan publik, dan penanganan sengketa pertanahan
		Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik bidang pengendalian penduduk melalui peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS dengan peningkatan kepesertaan KB, Pembinaan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga
		Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS	Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS
				Optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan meningkatkan inventarisasi potensi sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan partisipasi dan perannya
		Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana di daerah	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana	Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan mengoptimalkan tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha
		Meningkatnya layanan tramtibumlinmas	Meningkatkan kualitas layanan tramtibumlinmas melalui Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Pelayanan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya kesetaraan gender , perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan	Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dengan peningkatan jenis layanan, penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang representatif
		Meningkatnya tertib kearsipan daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kearsipan melalui peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dengan digitalisasi arsip, penyediaan sarana prasarana, pengelolaan arsip daerah, pelayanan kearsipan .
		Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat	Meningkatkan layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat koordinasi fasilitasi instansi pusat dan optimalisasi peran perangkat daerah dalam statistik sektoral	Meningkatkan penyediaan statistik dengan meningkatkan akurasi dan mempercepat time release data statistik
		Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	Meningkatkan tata kelola birokrasi urusan transmigrasi melalui peningkatan pelayanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	Peningkatan pelayanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi dengan meningkatkan kualitas data dan informasi ketransmigrasian (calon peserta maupun calon lokasi)

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang ESDM melalui peningkatan fasilitasi urusan ESDM	Peningkatan fasilitasi urusan ESDM dengan penyediaan data dan informasi yang akurat tentang ESDM di daerah
		Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.	Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan
VII	Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.			
VII.1	Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya status desa	Mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa	Pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa dengan peningkatan kapasitas aparat di desa, dukungan pembentukan BUMDES dan KAD,
VII.2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif sesuai dengan arahan pengembangan wilayah di daerah	Pembangunan kawasan perdesaan dengan melalui tahapan penyusunan regulasi, pemetaan potensi desa dan antar desa serta penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan.
VIII	Integrasi antar misi			
VIII.1	Meningkatkan produktivitas total daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan	Optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dengan meningkatkan produktivitasnya, menerapkan teknologi, dan memberdayakan penyuluh. Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup meliputi

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				:implementasi pertanian organik,larangan aktivitas peternakan skala besar di kawasan permukiman, pembinaan kepada pelaku usaha perikanan tentang penggunaan pakan dan obat-obatan, GAP dlm zonasi budidaya tambak udang, pembatasan area tambak udang,
			Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan dengan mengendalikn sistem stok bahan pangan, menyediakan sarana prasarana pendukungnya dan memperbaiki pola konsumsi pangan
			Mengembangkan agribisnis melalui pelaksanaan usaha agribisnis komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan	Melaksanakan usaha agribisnis dengan peningkatan sub sistem agroinput dan agroonfarm komoditas unggulan (Padi, Jagung, Durian, Biofarmaka, Kambing PE, Ikan, dan Gula Kelapa). Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup yaitu dengan penerapan pertanian organik disertai pembinaan kepada pelaku usaha perikanan tentang penggunaan pakan dan obat-obatan, GAP dlm zonasi budidaya tambak

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				udang, pembatasan area tambak udang
				Melaksanakan usaha agribisnis dengan peningkatan sub sistem agroprosesing dan agromarketing komoditas unggulan (Padi, Jagung, Durian, Biofarmaka, Kambing PE, Ikan dan gula kelapa)
			Meningkatkan daya jual potensi wisata daerah melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, <i>community development</i> , serta investor asing. Disertai upaya mitigasi meliputi : manajemen lingkungan dengan menyediakan fasilitas sanitasi dan tempat pembuangan sampah di lokasi wisata
			Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah	Melaksanakan pengelolaan industri kecil dan menengah melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan. Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup yaitu dengan menerapkan prinsip industri ramah lingkungan
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) melalui upaya penumbuhan, penyehatan, dan	Melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan pengembangan

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			pengawasan Koperasi serta UMK	jejaring usaha, peningkatan kualitas kelembagaannya, dan lomba-lomba dalam rangka penumbuhan usaha kecil berbasis desa
			Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perijinan , mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Atap, pelayanan perizinan online, Promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup meliputi: Pemantauan/audit lingkungan serta pengawasan/pengetatan perijinan alih fungsi lahan pertanian
			Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana, promosi , keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen	Melakukan revitalisasi pasar daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan daerah, melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya.

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Mewujudkan interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi melalui peningkatan kualitas pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan. Disertai upaya mitigasi terhadap Lingkungan Hidup meliputi: pengawasan pengambilan bahan galian, kesesuaian dengan arahan peruntukan RTRW, pengukuran emisi, dan penanaman vegetasi
			Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan melalui peningkatan kualitas pengelolaan layanan transportasi darat	Peningkatan kualitas pengelolaan layanan melalui upaya keselamatan transportasi
			Pemenuhan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas sesuai target nasional	Peningkatan cakupan akses layanan air minum, sanitasi dan rumah layak huni sesuai target nasional
			Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan melalui penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan
			Pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan infrastruktur kawasan strategis	Pembangunan infrastruktur kawasan strategis dengan membangun sarana prasarana dasar dan penunjang kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo, purwokulon (border city), kawasan strategis cepat tumbuh

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pengembangan sistem irigasi dan drainase.	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi dan drainase melalui pelayanan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi dan drainase.
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan optimalisasi upaya pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan persampahan dan limbah	Optimalisasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemenuhan baku mutu kualitas air, udara, serta meningkatkan tingkat tutupan lahan vegetasi
				Optimalisasi pengelolaan persampahan dan limbah melalui pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu dan berbasis komunitas
			Mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa	Pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa dengan peningkatan kapasitas aparat di desa, dukungan pembentukan BUMDES dan KAD,
			Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif sesuai dengan arahan pengembangan wilayah di daerah	Pembangunan kawasan perdesaan dengan melalui tahapan penyusunan regulasi, pemetaan potensi desa dan antar desa serta penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan.

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
VIII.2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan Aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas pada tingkat anak usia dini , pendidikan dasar, dan masyarakat serta peningkatan kualitas manajemen pelayanannya	<p>Peningkatan aksesibilitas pendidikan yg berkualitas pada tingkat anak usia dini, pendidikan dasar, dan masyarakat dengan memperbaiki distribusi tenaga pendidik, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan, mendorong peningkatan kualitas & hasil proses belajar mengajar, meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan</p> <p>Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan dengan meningkatkan kualitas data dan informasi tentang kondisi pendidikan, perencanaan di tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten, meningkatkan kualitas evaluasi dan pengendalian terhadap sekolah, proses belajar mengajar, dan tenaga pengajar</p> <p>Mewujudkan Satuan pendidikan berbasis e-learning melalui penyelenggaraan e-learning di tingkat SD dan SMP</p> <p>Mewujudkan penyelenggaraan e-learning di tingkat SD dan SMP dengan melalui tahapan penyusunan roadmap program e-learning, penerapan secara komprehensif (sarana prasana hingga SDM pelaku) namun distribusi lokasi bertahap sesuai kondisi</p>

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui penyuluhan dan promosi kesehatan	Penyuluhan dan promosi kesehatan melalui satuan pendidikan dasar, Puskesmas, desa siaga, kader kesehatan dan masyarakat
			Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selama 24 jam melalui pelayanan berdasar siklus daur kehidupan	Pelayanan kesehatan berdasar siklus daur kehidupan dengan pelayanan skrining dan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, penanganan penyakit menular dan peningkatan kesehatan lingkungan
VIII.3	Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran	Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui - peningkatan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu secara terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-desa)	3. Peningkatan pelayanan dasar melalui Sistem Jaminan Sosial bidang Kesehatan, Pendidikan, Pangan dan Papan 4. Dukungan bagi peningkatan produktivitas penduduk miskin
			Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS	Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS Optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan meningkatkan inventarisasi potensi sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
VIII.4				partisipasi dan perannya
	Menurunkan pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui : 3. pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitasnya serta peningkatan kesempatan kerja ; 4. pengembangan dan perlindungan tenaga kerja	2. Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja, dengan pelatihan berbasis kompetensi, layanan permagangan, padat karya serta meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan milik masyarakat, menyelenggarakan forum-forum untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, dan meningkatkan ketersediaan informasi pasar kerja 2. pengembangan dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja (jaminan sosial, syarat kerja, peraturan ketenagakerjaan) di perusahaan
			Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perijinan , mengembangkan

No	Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Pelayanan Terpadu Satu Atap, pelayanan perizinan online, Promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Disertai upaya mitigasi meliputi: Pemantauan/audit lingkungan serta pengawasan/pengetatan perijinan alih fungsi lahan pertanian
VIII.5	Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan infrastruktur kawasan strategis	Pembangunan infrastruktur kawasan strategis dengan membangun sarana prasarana dasar dan penunjang kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo, purwokulon (border city), kawasan strategis cepat tumbuh
			Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif sesuai dengan arahan pengembangan wilayah di daerah	Pembangunan kawasan pedesaan dengan melalui tahapan penyusunan regulasi, pemetaan potensi desa dan antar desa serta penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan.

Kebijakan umum pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 s.d 2021 setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel. 6.4 Arah Kebijakan Umum Tahunan RPJMD Kab.Purworejo Tahun 2016 – 2021

Prioritas Tahun 2016	Prioritas Tahun 2017	Prioritas Tahun 2018	Prioritas Tahun 2019	Prioritas Tahun 2020	Prioritas Tahun 2021
1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana	1. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi	1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah	2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2. Peningkatan kemandirian desa	2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi	2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi	2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah	3. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah	3. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	4. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	4. Peningkatan kemandirian desa	4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	4. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
5. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi	5. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	5. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah	6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah	6. Peningkatan kemandirian desa	6. Peningkatan kemandirian desa
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	7. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana	7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	7. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	7. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
8. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	8. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana	8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana	8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana	8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
	9. Peningkatan kemandirian desa	9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Strategi dari pengembangan wilayah ada 2 (dua) hal utama yaitu pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan infrastruktur kawasan strategis dan mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif

1. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten Purworejo terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Purworejo dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Purworejo.

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Purworejo

KSP Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 adalah KSP dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1) Kawasan Perkotaan Purworejo – Kutoarjo

Kawasan aglomerasi perkotaan Purworejo-Kutoarjo dalam struktur ruang direncanakan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hal tersebut didukung posisi yang strategis dan infrastruktur yang memadai sehingga kondisi perekonomiannya maju dengan pertumbuhan cepat. Dalam konstelasi regional, kawasan ini merupakan titik persimpangan jalan arteri yang menghubungkan kota-kota di Jawa Barat dengan kota-kota di Jawa Tengah bagian Selatan serta kota-kota di Provinsi DI Yogyakarta. Seiring dengan pesatnya perkembangan di kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo, maka pada tahun 2006 telah disusun dokumen rencana pengembangan kawasan aglomerasi Purworejo dan Kutoarjo yang meliputi:

- kawasan perkotaan Purworejo;
- kawasan koridor jalan ruas Purworejo-Kutoarjo; dan

- kawasan perkotaan Kutoarjo.

Oleh karena itu, kawasan ini memiliki kontribusi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten bahkan juga di tingkat provinsi sehingga selain sebagai PKL, direncanakan pula sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan di kawasan ini adalah jasa, perdagangan, dan industri, khususnya agrobisnis.

2) Kawasan Koridor Perbatasan Purworejo-Kulonprogo (Purwokulon)

Kawasan koridor perbatasan Purwokulon pada wilayah Kabupaten Purworejo berada di Kecamatan Kaligesing. Hal ini didukung oleh beberapa hal antara lain potensi yang berada di kawasan ini dan tersedianya jaringan jalan baik jalan provinsi pada ruas Purworejo – batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 18,47 (delapan belas koma empat puluh tujuh) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kaligesing, jalan kabupaten dan juga jalan local atau jalan lingkungan. Kawasan ini direncanakan untuk dikembangkan berbasis pertanian, pariwisata, jasa, dan perdagangan.

Dalam perkembangannya Kawasan Perbatasan Purworejo-Kulonprogo akan menjadi kawasan strategis baru dengan adanya rencana pembangunan Bandara Internasional “New Yogyakarta” di perbatasan Purworejo – Kulonprogo. Hal ini memerlukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo agar mampu mengakomodir dinamika perkembangan wilayah kedepan.

Disamping itu perubahan RTRW tersebut perlu diikuti dengan perubahan Perda tentang Kawasan Agropolitan Bagelen dan Perda Kawasan Bahari Terpadu.

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Purworejo

KSK Purworejo terdiri atas kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1) Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo adalah Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang direncanakan di kawasan perkotaan Kecamatan Purwodadi dan Kemiri, Kawasan Bahari Terpadu (KBT), kawasan agropolitan, serta kawasan perbatasan.

a) Kawasan Perkotaan Kecamatan Purwodadi

Kawasan Perkotaan Kecamatan Purwodadi ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi dengan pertimbangan bahwa ke depan kawasan ini akan dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). Ditinjau dari aspek lokasi, Kawasan Perkotaan Kecamatan Purwodadi cukup strategis, terletak di bagian selatan Kabupaten Purworejo. Terdapat fasilitas stasiun Kereta Api dan prasarana jalan yang menghubungkan antara jaringan jalan arteri nasional di sisi utara dengan jalan strategis nasional pada sisi selatan. Pengembangan pada kawasan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi wilayah kecamatan di sekitarnya, antara lain Kecamatan Bagelen, Ngombol, Grabag, dan Banyuurip.

b) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kemiri

Penetapan kawasan perkotaan kecamatan Kemiri sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi didasarkan pertimbangan bahwa kawasan ini dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) melayani beberapa kecamatan di sekitarnya antara lain Kecamatan Pituruh, Kecamatan Bruno, dan Kecamatan Gebang. Pengembangan perekonomian di kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah *hinterland*/belakangnya. Sama halnya dengan kawasan perkotaan kecamatan Purwodadi di sisi selatan, kawasan perkotaan kecamatan Kemiri juga didukung oleh sektor pertanian baik di lahan basah maupun lahan kering. Potensi utama di kawasan ini adalah adanya pusat pembenihan rakyat,

sehingga arahan pengembangan menjadi pusat layanan sektor jasa, keuangan dan perdagangan, khususnya sebagai pusat pemasaran hasil pembibitan rakyat.

- c) Kawasan Bahari Terpadu (KBT)**
 Kawasan pesisir selatan Kabupaten Purworejo dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 21,3 km mempunyai nilai penting bagi pertumbuhan ekonomi.
 Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo, luas KBT adalah ± 10.650 hektar yang dihitung dari garis pantai ke arah darat sejauh 5 km termasuk juga wilayah laut sejauh 4 mil yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah. Kawasan ini masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi.
 Potensi yang direncanakan untuk dikembangkan di KBT antara lain adalah perikanan, baik perikanan tangkap, budidaya perikanan maupun pengolahan ikan; industri; pariwisata; pertanian; perkebunan; dan pertambangan.
- d) Kawasan Agropolitan Purworejo**
 Pengembangan kawasan agropolitan Bagelen meliputi Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Kaligesing, dan Kecamatan Ngombol. Sementara pengembangan kawasan agropolitan Kuto Bumi Baru meliputi Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Bruno, dan Kecamatan Grabag.
- e) Kawasan Perbatasan**

Tabel. 6.5

Kawasan Strategis Pusat-pusat Pelayanan Perbatasan Lintas Wilayah

No.	Kecamatan	Desa	Lintas Layanan
1.	Bagelen	Dadirejo	Kabupaten Kulon Progo
2.	Purwodadi	Jogoboyo	Kabupaten Kulon Progo
3.	Loano	Sedayu	Kabupaten Kulon Progo
4.	Bener	Ngasinan	Kabupaten Wonosobo
5.	Bener	Cacaban	Kabupaten Magelang
6.	Bruno	Tegalsari	Kabupaten Wonosobo
7.	Pituruh	Brengkol	Kabupaten Kebumen

8.	Butuh	Wironatan	Kabupaten Kebumen
9.	Grabag	Nambangan	Kabupaten Kebumen

Sumber : Hasil Analisis, 2009

- 2) Kawasan Untuk Kepentingan Sosial dan Budaya
 - a) Kawasan Situs Prasasti Kayu Arahiwang
Situs prasasti kayu arahiwang berada di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip.
 - b) Kawasan Alun-Alun Purworejo dan Sekitarnya
 - c) Kawasan Alun-Alun Kutoarjo dan Sekitarnya
 - d) Kawasan Petilasan WR. Supratman
- 3) Kawasan Untuk Kepentingan Fungsi & Daya Dukung
 - Lingk.Hidup
 - a) Kawasan Daerah Aliran Sungai Bogowonto, Cokroyasan, dan Wawar
 - b) Kawasan Pegunungan Menoreh
 - c) Kawasan Pegunungan Serayu Selatan
 - d) Kawasan Pantai Berhutan Bakau
 - e) Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Gunung Tumpeng

- 2. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan
 - a. Kawasan Perkotaan :
Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Purworejo terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Tabel 6.6
Rencana Jangkauan Pelayanan Sistem Perkotaan di Kabupaten Purworejo 2011-2021

No	Kawasan	Fungsi	Jangkauan Pelayanan
1	Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	PKL	Seluruh wilayah kabupaten Purworejo, sebagian Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Kulonprogo dan Magelang.
2	Perkotaan Kemiri	PKLp	Kabupaten Purworejo, khususnya Kecamatan Bruno, Gebang, Pituruh
3	Perkotaan Purwodadi	PKLp	Kabupaten Purworejo, khususnya Kecamatan Bagelen, Ngombol, Banyuurip
4	Perkotaan Bener	PPK	Semua desa di Kecamatan Bener

5	Perkotaan Grabag	PPK	Semua desa di Kecamatan Grabag
6	Perkotaan Gebang	PPK	Semua desa di Kecamatan Gebang
7	Perkotaan Banyuurip	PPK	Semua desa di Kecamatan Banyuurip
8	Perkotaan Bayan	PPK	Semua desa di Kecamatan Bayan
9	Perkotaan Pituruh	PPK	Semua desa di Kecamatan Pituruh
10	Perkotaan Butuh	PPK	Semua desa di Kecamatan Butuh
11	Perkotaan Loano	PPK	Semua desa di Kecamatan Loano
12	Perkotaan Bagelen	PPK	Semua desa di Kecamatan Bagelen
13	Perkotaan Ngombol	PPK	Semua desa di Kecamatan Ngombol
14	Perkotaan Kaligesing	PPK	Semua desa di Kecamatan Kaligesing
15	Perkotaan Bruno	PPK	Semua desa di Kecamatan Bruno

Sumber: Hasil Analisa, 2009.

- b. Kawasan Perdesaan :
- Sistem perdesaan di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan membentuk pusat-pusat pelayanan lingkungan dan kawasan agropolitan secara berhierarki pada kawasan – kawasan perdesaan dan kawasan –kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.
- Sistem Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) tersebut meliputi pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa/antar dusun dalam satu desa dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

- 1) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa.PPL diwujudkan dalam rencana pengembangan Kawasan Perdesaan Potensial yang direncanakan terdapat di semua Kecamatan, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.7
PPL, Keunggulan Desa, dan Desa-Desa *Hinterland*nya
di Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	PPL	Keunggulan Desa	Desa-Desa <i>Hinterland</i>
1.	Grabag	Nambangan	pasar, kelompok pertokoan, industri makanan	1. Ukirsari 2. Sumberagung 3. Kertojayan
2.	Ngombol	Wonoroto	pasar desa, warung, industri makanan	1. Tunjungan 2. Ringgit 3. Kumpulsari 4. Kaliwungu Kidul 5. Kesidan 6. Pejagran
3.	Purwodadi	Geparang	pasar permanen, industri kayu dan makanan, SMU,	1. Kepongkok 2. Gesing 3. Nampurejo

No.	Kecamatan	PPL	Keunggulan Desa	Desa-Desa <i>Hinterland</i>
			Pustu	4. Jatimalang 5. Jatikontal
4.	Bagelen	Soko	Pasar, kios sarana produksi, warung, Pustu, SLTP	1. Piji 2. Clapar 3. Semagung
5.	Kaligesing	Pandanrejo	pasar permanen, industri kerajinan kayu, SMU, Pustu	1. Tawangsari 2. Purbowono 3. Tlogoguwo
6.	Purworejo	Sidomulyo	industri anyaman, makanan dan minuman, Pustu, Ponpes/Madrasah Diniyah	1. Sidorejo 2. Wonotulus 3. Sudimoro
7.	Banyuurip	Tanjunganom	pasar, warung, Industri kayu dan kulit, Pustu	1. Sokowaten 2. Golok 3. Kertosono 4. Sawit
8.	Bayan	Krandegan	SLTP, Poliklinik/BP, Pustu, warung, industri logam dan makanan, lapangan	1. Tangkisan 2. Banjarejo 3. Pogung kalangan
9.	Kutoarjo	Suren	Poliklinik/BP, Puskesmas, Ponpes/Madrasah Diniyah, Kios sarana produksi, industri kayu dan makanan, warung	1. Kiyangkongrejo 2. Karangwuluh 3. Kepuh 4. Purwosari 5. Kuwurejo
10.	Butuh	Sruwohrejo	Pasar, Industri makanan, Puskesmas, lapangan	1. Kedungagung 2. Ketug 3. Lubangkidul
11.	Pituruh	Brengkol	Pasar, kelompok pertokoan, Industri makanan, Ponpes/Madrasah Diniyah	1. Kalijering 2. Girigondo 3. Karang getas
12.	Kemiri	Kedungpomahan kulon	Pasar, industri dari kayu, Pustu	1. Kedung pomahan wetan 2. Sokogelap 3. Gunungteges
13.	Bruno	Tegalsari	Pasar permanen, kerajinan kayu dan makan, SLTP, Ponpes/Madrasah Diniyah, Pustu, tempat praktek dokter dan bidan	1. Desa Blimbing 2. Desa Kaliwungu 3. Desa Somoleter
14.	Gebang	Seren	Pasar permanen, industri makanan, SLTP, Ponpes/Madrasah Diniyah, Pustu, tempat praktek bidan	1. Kroyo 2. Gintungan 3. Lugosobo 4. Winonglor 5. Winongkidul
15.	Loano	Maron	Pasar permanen, industri makanan, SMU, Ponpes/Madrasah Diniyah, Puskesmas, tempat praktek dokter dan bidan	1. Kedungpoh 2. Kalisemo
16.	Bener	Kedungpucang	Pasar permanen, kelompok pertokoan, warung, pasar hewan, industri anyaman dan makanan	1. Sendangsari 2. Kaliwader 3. Kedungloteng

Sumber : Revisi Identifikasi KTP2D Kabupaten Purworejo, 2006 dan hasil analisa 2009.

2) Kota Tani Kawasan Agropolitan

Kota tani kawasan agropolitan merupakan pusat pelayanan kegiatan di kawasan agropolitan, yang terdiri dari kota tani utama dan kota tani. Pengembangan kota tani kawasan agropolitan ini direncanakan terdiri atas:

- a) Pengembangan kawasan kota tani agropolitan Bagelen meliputi:
 - Pengembangan kota tani utama di Desa Krendetan Kecamatan Bagelen;
 - Pengembangan kota tani meliputi:
 - Desa Purwodadi di Kecamatan Purwodadi;
 - Desa Somongari di Kecamatan Kaligesing; dan
 - Desa Ngombol di Kecamatan Ngombol.
- b) Pengembangan kawasan kota tani agropolitan Kuto Bumi Baru meliputi:
 - Pengembangan kota tani utama di Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo;
 - Pengembangan kota tani meliputi:
 - Desa Klepu di Kecamatan Butuh;
 - Desa Winong di Kecamatan Kemiri;
 - Desa Kalikotes di Kecamatan Pituruh;
 - Desa Cepedak di Kecamatan Bruno; dan
 - Desa Grabag di Kecamatan Grabag.